

## **STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR**

Nazera Izlyn<sup>1</sup>, Nurrabani<sup>2</sup>, Dea Ananda Fitri<sup>3</sup>, Rizki Ananda<sup>4</sup>  
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai<sup>1,2,3</sup>  
[nazeraizlyn009@gmail.com](mailto:nazeraizlyn009@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[Nurrabani11121@gmail.com](mailto:Nurrabani11121@gmail.com)<sup>2</sup>, [deaanandafitri251@gmail.com](mailto:deaanandafitri251@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id](mailto:rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*This research investigates the financing standards of the Basic Education Unit, highlighting the critical need for adequate funding to support various educational activities. Whether it is ongoing programs, future initiatives or long-term planning, every education unit depends on financial resources to function effectively. Education-related costs, including capital, operational and personnel expenditures, are subject to certain guidelines and standards. The Basic Education Cost Standards Education Policy provides a framework for schools to responsibly manage their financial resources in accordance with these standards, ensuring the efficient allocation of funds to achieve educational objectives. By adhering to these technical guidelines, education units can establish sound financing policies that are aligned with their objectives and improve overall educational outcomes.*

*Keywords: financing standards, basic education, financing conditions*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menyelidiki standar pembiayaan Satuan Pendidikan Dasar, menyoroti kebutuhan penting akan dana yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan. Baik itu program yang sedang berjalan, inisiatif di masa depan, atau perencanaan jangka panjang, setiap satuan pendidikan bergantung pada sumber daya keuangan agar dapat berfungsi secara efektif. Biaya yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk belanja modal, operasional, dan pegawai, tunduk pada pedoman dan standar tertentu. Kebijakan Pendidikan Standar Biaya Pendidikan Dasar memberikan kerangka kerja bagi sekolah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara bertanggung jawab sesuai dengan standar ini, memastikan alokasi dana yang efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan mematuhi pedoman teknis ini, satuan pendidikan dapat menetapkan kebijakan pembiayaan yang baik dan selaras dengan tujuan mereka dan meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci: standar pembiayaan, pendidikan dasar, kondisi pembiayaan

## **A. Pendahuluan**

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan merupakan upaya yang terencana dan terstruktur untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif. Melalui proses ini, siswa didorong untuk secara aktif memupuk kemampuan bawaan mereka, memupuk ketahanan spiritual, disiplin diri, pertumbuhan pribadi, kecakapan intelektual, karakter berbudi luhur, dan keterampilan penting yang diperlukan untuk kemajuan diri mereka sendiri, serta kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara (Sudarmono et al., 2020).

Mutu pendidikan tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia saja, namun juga pada kecukupan pembiayaan program pendidikan. Pendanaan pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan upaya kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat. Ketika pendanaan untuk pendidikan dibatasi hanya pada satu sumber, kualitas pendidikan mungkin

akan menurun, karena diperlukan biaya yang tinggi untuk menjamin hasil pembelajaran yang optimal (Aflaha et al., 2021).

Penting untuk mengakui bahwa pendidikan tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa dukungan finansial yang memadai. Kompleksitas desentralisasi pendidikan semakin menyoroti perlunya para pengambil keputusan memiliki akses terhadap informasi komprehensif mengenai pembiayaan pendidikan. Tuntutan ini semakin mendesak dengan dimulainya otonomi daerah, khususnya di bidang pendidikan. Kebutuhan ini semakin mendesak dengan dimulainya otonomi daerah, khususnya di bidang pendidikan. Seluk-beluk pembiayaan pendidikan melibatkan jaringan komponen yang saling berhubungan mulai dari satuan pendidikan hingga sistem nasional. Hal ini mencakup sumber pendanaan, mekanisme alokasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tantangan yang ada di sektor pendidikan. Studi khusus sangat penting untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai pembiayaan pendidikan dan berbagai kompleksitasnya. Institusi pendidikan,

seperti halnya dunia usaha lainnya, menghadapi tantangan yang sama dalam mengelola biaya produksi. Namun, mereka juga menghadapi kerumitan unik dalam menghitung pengeluaran ini secara akurat.

J. Hallack memaparkan tiga tantangan utama dalam pendidikan, termasuk perlunya definisi yang jelas mengenai produksi pendidikan, identifikasi transaksi ekonomi dalam bidang pendidikan, dan pengakuan pendidikan sebagai layanan publik. Pembiayaan dalam pendidikan memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran proses belajar mengajar. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kemanjuran inisiatif pendidikan, yang mencakup perolehan peralatan penting, remunerasi bagi pendidik, gaji staf, dan pelaksanaan berbagai kegiatan kelembagaan. Selain itu, pembiayaan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pendidikan yang diberikan secara keseluruhan.

Analisis biaya pendidikan menawarkan segudang manfaat, termasuk meningkatkan kemudahan, memberikan informasi penting bagi pengambil keputusan dalam

menentukan kebijakan sekolah, memastikan alokasi dana pendidikan yang efektif dan efisien, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan. Secara khusus, penelaahan manfaat biaya pendidikan dapat menjadi pedoman penting bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN, sekaligus menjadi landasan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam bidang kemajuan masyarakat, kajian terhadap keuntungan berinvestasi di bidang pendidikan berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mengambil keputusan yang tepat. Memahami potensi keuntungan dari investasi semacam ini sangatlah penting, karena ada orang-orang yang menganggap pendidikan hanya sekedar pengeluaran yang sia-sia dan manfaatnya tidak pasti untuk kesuksesan di masa depan (Aflaha et al., 2021).

Selanjutnya disebutkan bahwa standar biaya satuan pendidikan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri yang didasarkan pada usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini dimaksudkan sebagai

acuan internal yang berharga bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia (Rida Fironika, 2011).

Tingkat investasi pada pendidikan dasar berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan hasil siswa. Biaya yang lebih rendah dapat menghambat pengalaman pendidikan dan prestasi keseluruhan di sekolah dasar. Penting untuk mengenali korelasi positif antara pendanaan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar (Fattah, 2000).

### **B. Metode Penelitian**

Artikel ini dengan meninjau dan mengkaji berbagai perspektif mengenai isu-isu kontroversial, situasi kompleks, dan kebijakan yang diperdebatkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kajian pustaka (*literature research*) yang menyeluruh. Penelitian ini akan mendalami analisis korelasi jurnal ilmiah dalam wacana yang dipilih, menghadirkan pendekatan yang halus dan cermat. Tahapan metodologi penelitian ini meliputi pemilihan artikel, pengumpulan data

awal, mengatasi tantangan, mengumpulkan data pendukung, dan pada akhirnya merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **a. Standar Pembiayaan Pendidikan**

Banyak upaya pendidikan memerlukan dukungan finansial, karena setiap lembaga pendidikan memerlukan dana untuk melaksanakan programnya dengan sukses. Hal ini mencakup pendanaan untuk kegiatan saat ini, program yang sedang berjalan, dan inisiatif di masa depan. Pembiayaan pendidikan tunduk pada peraturan yang menetapkan standar minimal pengalokasiannya, meliputi belanja modal, biaya operasional, dan belanja pegawai. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 menguraikan pedoman khusus untuk menentukan biaya yang diperlukan bagi siswa, yang mencakup biaya umum dan biaya tambahan.

Pendanaan pendidikan mencakup semua biaya yang terkait dengan mendukung upaya pendidikan, baik dalam bentuk moneter atau non-moneter. Pembiayaan pendidikan memegang

peranan penting dalam memfasilitasi kemajuan kegiatan pendidikan, sehingga efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam pemanfaatannya. Dengan mematuhi standar peraturan internal dan pengaturan standar, pembiayaan pendidikan harus memprioritaskan alokasi sumber daya yang efisien untuk memajukan pendidikan dan mencapai hasil pendidikan yang diinginkan (Vista & Sabandi, 2020).

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV), pemerintah diamanatkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada seluruh warga negara yang mengenyam pendidikan dasar. Komitmen terhadap pendidikan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan integritas moral, kecerdasan, kreativitas, dan keterampilan generasi muda bangsa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih sejahtera dan tercerahkan (Haris, 2016).

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sukses, penting untuk mengelola biaya secara efektif sesuai dengan kebutuhan pendanaan. Pengawasan keuangan memerlukan perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan yang menyeluruh. Penganggaran yang strategis dan kolaboratif di antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan transparansi. Melalui keterbukaan, keterlibatan, dan akuntabilitas di semua tahapan pendidikan, kita dapat memastikan efisiensi sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk pendidikan (Ferdin, 2013).

Pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan komitmen keuangan pribadi. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, dan pemeliharaan modal kerja tetap. Selain itu, biaya pribadi memerlukan biaya pendidikan yang dikeluarkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji dan tunjangan pendidik dan staf, serta biaya bahan pendidikan, utilitas, pemeliharaan, transportasi, dan biaya lain-lain (Sulistiyoningrum, 2010).

### **b. Kebijakan Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Dasar**

Sesuai dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2013, modal pendanaan pendidikan akan dialokasikan dalam satu tahun anggaran untuk menjamin pemanfaatan anggaran pendidikan secara optimal. Analisis menyeluruh terhadap pendapatan dan pengeluaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peraturan pemerintah pada Bab IX Pasal 62 menguraikan tentang standar pembiayaan pendidikan, dengan menetapkan alokasi anggaran kegiatan pendidikan pada tahun tertentu. Hal ini mencakup pertimbangan biaya modal dan operasional, serta biaya personal. Analisis pembiayaan pendidikan lebih dari sekedar pengeluaran, dengan mempertimbangkan sumber pendapatan dan berpegang pada pedoman standar untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program pendidikan.

Standar Pembiayaan Pendidikan yang diuraikan dalam Bab IX: Pasal 62 mencakup pendekatan komprehensif terhadap pendanaan

pendidikan. Ini termasuk ketentuan investasi modal, biaya operasional, dan biaya pribadi. Pendanaan biaya modal mencakup berbagai pengeluaran seperti fasilitas sekolah, pelatihan pendidik, dan modal kerja tetap. Biaya pribadi untuk siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan juga diperhitungkan. Selain itu, biaya operasional mencakup berbagai pengeluaran termasuk sarana, prasarana, dan pajak. Standar-standar ini memastikan bahwa pembiayaan pendidikan bersifat menyeluruh dan mendukung kebutuhan holistik lembaga pendidikan dan siswa (Raharjo, 2006).

Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar dibentuk melalui pedoman teknis yang tepat untuk memastikan alokasi dana yang efisien untuk kegiatan sekolah. Dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah diamanatkan untuk mematuhi standar yang telah ditentukan dalam mengelola keuangan. Sekolah mempunyai otonomi untuk menetapkan kebijakan yang selaras dengan pedoman teknis pengalokasian dana pendidikan.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang

dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 8 Tahun 2020 memberikan pedoman pengalokasian dan pemanfaatan dana operasional sekolah. Peraturan tersebut memuat ketentuan bagi lembaga pendidikan dasar untuk menerima bantuan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar, dengan masing-masing siswa menerima bantuan sebesar Rp900.000. Dana tersebut ditujukan untuk berbagai biaya operasional sekolah, seperti pendaftaran siswa, kegiatan pembelajaran, program ekstra-kurikuler, dan gaji pegawai. Dengan mematuhi pedoman ini, sekolah dapat mengelola kebijakan pembiayaan mereka secara efektif untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan pada akhirnya mencapai tujuan pendidikan (Kurniady, 2011).

### **C. Kondisi Pembiayaan Pendidikan**

Dilema pendidikan di Indonesia mirip dengan jaringan yang kompleks, sehingga sulit untuk menentukan titik awal penyelesaian yang menyeluruh. Permasalahan yang melanda sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh sistem itu sendiri, namun juga karena tindakan para penyelenggara

pendidikan. Sungguh menyedihkan melihat individu-individu dari latar belakang yang memiliki hak istimewa memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, sementara mereka yang berasal dari keadaan kurang beruntung tidak mempunyai pilihan. Tragisnya, banyak anak usia sekolah tidak dapat bersekolah karena biaya yang sangat mahal, sehingga menyebabkan meluasnya pengangguran, kejahatan, dan kemiskinan. Kurangnya pendanaan pendidikan semakin memperburuk tantangan-tantangan masyarakat ini, sehingga memerlukan upaya bersama dari Pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah mendesak ini.

Saat ini, sistem pembiayaan pendidikan yang ada belum mampu memberikan dukungan yang memadai kepada siswa yang kurang beruntung secara ekonomi. Ke depannya, sistem pembiayaan pendidikan kita harus selaras dengan komitmen kita untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi bagi semua orang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sangatlah penting untuk menerapkan pendekatan pembiayaan subsidi silang yang memprioritaskan siswa yang tidak memiliki akses terhadap

pendidikan karena kesulitan ekonomi. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 52 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Peraturan ini mengamanatkan agar lembaga pendidikan yang berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Pusat dan Daerah menganut sistem subsidi langsung yang dijabarkan secara cermat oleh masing-masing lembaga pendidikan (Depdiknas, 2008).

Temuan studi Fattah (1998) mengenai pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri menggaris bawahi pentingnya peran faktor internal sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Secara khusus, faktor-faktor seperti kesejahteraan guru, kemampuan guru, fasilitas kelas, dan buku pelajaran diidentifikasi sebagai komponen utama kerangka RAPBS, sehingga memerlukan pendekatan strategis dalam mengalokasikan biaya secara efektif.

Keberhasilan akademik siswa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan eksternal, termasuk stabilitas keuangan orang tua dan aspirasi pendidikan keluarga mereka. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Fattah (1999) yang

menemukan bahwa sekolah di perkotaan, yang biasanya memiliki keluarga lebih makmur, cenderung menawarkan pendidikan berkualitas lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah di pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih rendah. Sekolah dengan keterlibatan orang tua yang kuat dan lingkungan keluarga yang mendukung mampu menyediakan sumber daya dan tenaga pengajar yang unggul, yang mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran dan pada akhirnya prestasi siswa yang lebih baik.

Fattah (2006) berpendapat bahwa anggaran berfungsi sebagai alat yang berharga dengan tiga manfaat berbeda: sebagai alat untuk memperkirakan, sebagai alat untuk menyetujui pengeluaran, dan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi. Aspek efisiensi penganggaran sangat penting karena memungkinkan pengendalian yang efektif dengan membandingkan angka standar dengan biaya aktual untuk mengidentifikasi area pemborosan atau potensi penghematan.

Tanggung jawab pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien merupakan ikhtiar bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Membangun rasa saling percaya di dalam Pemerintah dan antara Pemerintah, masyarakat, dan dirinya sendiri adalah hal yang sangat penting. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di seluruh proses pendidikan mulai dari perencanaan hingga pengawasan sangat penting untuk keberhasilan pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia kini semakin tidak terjangkau bagi banyak orang, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Meskipun sekolah menerima sejumlah bantuan keuangan, namun hal tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya bagi mereka yang membutuhkan. Pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi, operasional, dan pribadi, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, biaya siswa, gaji pendidik, material, dan berbagai pengeluaran lainnya. Dengan secara kolektif mengkaji dan memperbaiki sistem yang kompleks ini, kita dapat berjuang menuju masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pendidikan yang berkualitas.

#### **D. Kesimpulan**

Setiap satuan pendidikan mengandalkan pendanaan untuk mendukung berbagai program

kegiatannya, termasuk inisiatif saat ini, yang akan datang, dan yang akan datang. Pembiayaan pendidikan berpegang pada pedoman khusus mengenai pengalokasian dana untuk biaya modal, operasional, dan pegawai. Biaya-biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter. Penting untuk memprioritaskan efisiensi dan efektivitas ketika memanfaatkan pembiayaan pendidikan untuk menjamin kelancaran program pendidikan. Selain pertimbangan penggunaan, analisis pembiayaan pendidikan juga mempertimbangkan sumber pendapatan dan standar anggaran untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Jakarta.
- Fattah, Nanang. 2006. Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Fattah. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Rosda. Bandung.
- Fattah, Nanang. 1999. Studi Tentang Pembiayaan Sekolah Dasar di Bandung. Disertasi UPI Bandung.

Fattah, Nanang. 1998. Landasan Manajemen Pendidikan. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

**Jurnal :**

Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis standar pembiayaan pendidikan. *MASILE*, 2(1), 24-59.

Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.

Haris, H. A. (2016). Analysis on Policy Regulation of the Minister of National Education No . 69 / 2009 About Funding Education Standards. (69), 365–374.

Kurniady, D. A. (2011). Pengelolaan pembiayaan sekolah dasar di kabupaten bandung. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(1), 34–51.

(Raharjo, n.d.) Budaya, B., Malang, U. W., & Nasional, S. P. (2006). Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. 42–59.

Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43-63.

Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266-280.

Sulistyoningrum, Nining. 2010. Standar Pembiayaan Pendidikan. dari <http://niningsulistyoningrum.wordpress.com/2010/05/15/standar-pembiayaan-pendidikan>.

Vista, A., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 170-175.